



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHAIDA SIRUN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 145756

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.800.000.000**

1. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA SORONG, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/88 m2 di KAB / KOTA
SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA SORONG , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA SORONG , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SORONG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 86.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 24.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 10.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.920.500.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.920.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.